

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Mengacu pada hasil temuan diatas, sehingga diperoleh kesimpulan yaitu:

1. Ketimpangan Pendapatan Tidak Berpengaruh Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban

Hasil dari studi mengindikasikan bahwa perbedaan dalam pendapatan tidak memberikan dampak yang berarti terhadap jumlah orang miskin di Kabupaten Bojonegoro maupun Kabupaten Tuban. Tinggi rendahnya ketimpangan tidak secara langsung menentukan naik turunnya jumlah masyarakat miskin di kedua kabupaten tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan adalah masalah yang rumit dan tidak bisa dipahami hanya dari satu sudut pandang distribusi pendapatan saja. Faktor-faktor lain seperti peluang kerja, mutu pendidikan, struktur ekonomi lokal, serta kebijakan sosial mungkin memiliki pengaruh yang paling besar terhadap situasi kemiskinan. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi kemiskinan harus dilaksanakan secara komprehensif dan meliputi beragam aspek dalam kehidupan masyarakat agar hasilnya dapat dirasakan dengan nyata dan berkelanjutan.

2. Indeks Pembangunan Manusia Berpengaruh Negatif dan Signifikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, semakin baik pendidikan, kesehatan, dan taraf hidup masyarakat, maka semakin besar peluang penurunan kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa

kemiskinan bukan hanya persoalan keuangan, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Saat masyarakat memiliki akses pendidikan yang layak, kondisi kesehatan yang baik, serta kemampuan untuk meningkatkan produktivitas, mereka lebih mampu memperbaiki taraf hidupnya secara berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan manusia menjadi fondasi utama dalam upaya pengentasan kemiskinan yang lebih permanen, merata, dan berkeadilan.

3. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Tidak Berpengaruh Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban

Temuan studi menunjukkan yakni kemajuan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro belum sanggup memberikan dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan. Tinggi rendahnya laju pertumbuhan tidak secara otomatis diikuti oleh perubahan tingkat penduduk miskin, sehingga dapat dipahami bahwa pertumbuhan yang terjadi belum sepenuhnya inklusif dan merata. Temuan ini menegaskan bahwa kemiskinan tidak sekedar persoalan sejauh mana ekonomi tumbuh, tetapi juga bagaimana hasil pertumbuhan tersebut didistribusikan dan dirasakan oleh masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Dengan demikian, dibutuhkan kebijakan yang tidak semata-mata berfokus pada peningkatan pertumbuhan secara angka, namun juga menjamin terciptanya lapangan kerja, keseragaman pendapatan, dan akses ekonomi yang lebih luas agar kesejahteraan benar-benar meningkat secara berkelanjutan.

5.2 Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang bisa dipikirkan berkaitan dengan kesimpulan yang telah disebutkan sebelumnya.:

1. Untuk mengentas atau mengurangi kemiskinan dengan memperkuat pembangunan manusia sebagai prioritas utama kebijakan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban perlu terus meningkatkan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta daya beli masyarakat melalui program-program yang tepat sasaran. Melalui alokasi dana untuk pengembangan sumber daya manusia, dampak signifikan dapat dicapai dalam mengurangi angka kemiskinan. Untuk itu, peningkatan akses pendidikan yang adil, pemberian beasiswa kepada keluarga yang kurang mampu, perbaikan sarana kesehatan, serta pengembangan pelatihan keahlian kerja menjadi kebijakan penting untuk membangun komunitas yang lebih mandiri dan produktif.
2. Memacu perkembangan ekonomi yang lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat kecil serta menganalisis sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan tersebut dapat membuka bidang pekerjaan yang luas, terutama untuk kelompok berpenghasilan rendah. Dukungan terhadap UMKM, pengembangan sektor padat karya, serta pemberdayaan ekonomi lokal dapat menjadi upaya konkret agar pertumbuhan ekonomi benar-benar berdampak pada penurunan kemiskinan secara berkelanjutan.
3. Menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan secara komprehensif dan terintegrasi. Karena kemiskinan bersifat kompleks dan tidak hanya dipengaruhi oleh ketimpangan pendapatan, maka penanganannya perlu dilakukan secara menyeluruh. Sinergi antara kebijakan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan

perlindungan sosial sangat diperlukan agar intervensi yang dilakukan tidak berjalan sendiri-sendiri. Program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan akses terhadap peluang ekonomi harus dirancang secara berkelanjutan dan tepat sasaran, sehingga mampu memberikan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.